



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 84 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang. ...



7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

24. Peraturan. . .

24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Penerimaan adalah uang yang masuk ke Kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
9. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
12. Pembiayaan Daerah adalah Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. SILPA adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2025 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.2.245.348.544.882 ,00 (*Dua triliun dua ratus empat puluh lima miliar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 197.990.791.000,00 (*Seratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 94.528.500.000,00 (*Sembilan puluh empat miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 61.442.291.000,00 (*Enam puluh satu miliar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.800.000.000,00 (*Enam miliar delapan ratus juta rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 35.220.000.000,00 (*Tiga puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 94.528.500.000,00 (*Sembilan puluh empat miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - b. Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - c. Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak air tanah;
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. Pajak sarang burung walet;
 - h. Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB);
 - i. Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

(2) Pajak. . .

- (2) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.600.000.000,00- (*Tujuh miliar enam ratus juta rupiah*).
- (3) Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00- (*Dua miliar lima ratus juta rupiah*).
- (4) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 29.167.500.000,00- (*Dua puluh sembilan miliar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00,- (*Dua miliar rupiah*).
- (6) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00,- (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (7) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00- (*Lima miliar rupiah*).
- (8) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 11.000.000,00- (*Sebelas juta rupiah*).
- (9) Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 28.000.000.000,00- (*Dua puluh delapan miliar rupiah*).
- (10) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,00- (*Dua puluh miliar rupiah*).

Pasal 6

- (1) Pendapatan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 61.442.291.000,00 (*Enam puluh satu miliar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 58.321.291.000,00- (*Lima puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.471.000.000,00- (*Satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.650.000.000,00- (*Satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.800.000.000,00- (*Enam miliar delapan ratus juta rupiah*), yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 35.220.000.000,00 (*Tiga puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain; dan
 - d. Pendapatan denda pajak daerah.
- (2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00- (*Seratus juta rupiah*).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00- (*Lima miliar rupiah*).
- (4) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00- (*Tiga puluh miliar rupiah*).
- (5) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,00,- (*Seratus dua puluh juta rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.010.706.630.724,00 (*Dua triliun sepuluh miliar tujuh ratus enam juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.845.645.766.000,00 (*Satu triliun delapan ratus empat puluh lima miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 165.060.864.724,00 (*Seratus enam puluh lima miliar enam puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah*).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.845.645.766.000,00 (*Satu triliun delapan ratus empat puluh lima miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Insentif Fiskal
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.560.316.557.000,00,- (*Satu triliun lima ratus enam puluh miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*).
- (3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.010.851.000,00,- (*Dua puluh dua miliar sepuluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah*).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 263.318.358.000,00,- (*Dua ratus enam tiga miliar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 11

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.560.316.557.000,00,- (*Satu triliun lima ratus enam puluh miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
 - d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 227.579.125.000,00,- (*Dua ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 928.464.162.000,00,- (*Sembilan ratus dua puluh delapan miliar empat ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu rupiah*).
- (4) Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 113.823.162.000,00,- (*Seratus tiga belas miliar delapan ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah*).
- (5) Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 290.450.108.000,00,- (*Dua ratus sembilan puluh miliar empat ratus lima puluh juta seratus delapan ribu rupiah*).

Pasal 12

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 36.651.123.158,00 (*Tiga puluh enam miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 36.651.123.158,00 (*Tiga puluh enam miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah*).

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 2.271.736.117.282,00 (*Dua triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.612.219.110.443,00 (*Satu triliun enam ratus dua belas miliar dua ratus sembilan belas juta seratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 864.073.188.223,00 (*Delapan ratus enam puluh empat miliar tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 712.340.447.084,00 (*Tujuh ratus dua belas miliar tiga ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah*).
 - (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu miliar dua ratus juta rupiah*).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 32.839.475.136,00 (*Tiga puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah*).
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.766.000.000,00 (*Satu miliar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 864.073.188.223,00 (*Delapan ratus enam puluh empat miliar tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 644.625.818.156,00 (*Enam ratus empat puluh empat miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu seratus lima puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 192.514.722.061,00 (*Seratus sembilan puluh dua miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam puluh satu rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 149.790.855.899,00 (*Seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.397.331.700,00 (*Dua puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus satu ribu tujuh ratus rupiah*).

(6) Belanja gaji...

- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 287.177.506,00 (*Dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam rupiah*).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 652.000.000,00 (*Enam ratus lima puluh dua juta rupiah*).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.596.138.800,00 (*Empat miliar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 712.340.447.084,00 (*Tujuh ratus dua belas miliar tiga ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
 - g. Belanja Barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 178.295.274.760,00 (*Seratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 287.773.069.234,00 (*Dua ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.482.583.196,00 (*Dua puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 81.458.962.250,00 (*Delapan puluh satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.680.175.000,00 (*Enam miliar enam ratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 66.709.964.845,00 (*Enam puluh enam miliar tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 50.697.952.200,00 (*Lima puluh miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 274.532.166.839,00 (*Dua ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (*Tiga ratus lima puluh juta*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 57.453.372.111,00 (*Lima puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus sebelas rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 88.667.156.756,00 (*Delapan puluh delapan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 122.483.992.132,00 (*Seratus dua puluh dua miliar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.278.645.840,00 (*Lima miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah*).
- (7) Belanja Modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 299.000.000,00 (*Dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*).

Pasal 18

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (*Tiga miliar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp. 381.484.840.000,00 (*Tiga ratus delapan puluh satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.898.218.000,00 (*Sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 371.586.622.000,00 (*Tiga ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 20

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 21

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.887.572.400,00 (*Dua puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah*), yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Pasal 22

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (*Dua miliar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penyertaan modal daerah.

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (*Dua miliar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 23

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 26.387.572.400,00 (*Dua puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 26.387.572.400,00 (*Dua puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 24

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta skpd pemberi bantuan sosial;

5. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Bantuan Keuangan;
- Lampiran Vb Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta skpd pemberi bantuan keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Insfrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah APBD;
11. Lampiran XI Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran Rancangan APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
12. Lampiran XII Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 25

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 26

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



JUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2024 NOMOR 84



Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 84 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	197.990.791.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	94.528.500.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.000.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.000.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.000.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	250.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	250.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	250.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	11.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	11.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	11.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.000.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.000.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.600.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	7.600.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	7.600.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.500.000.000,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	2.500.000.000,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	2.500.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	29.167.500.000,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	2.100.000.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	2.100.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	26.567.500.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	26.567.500.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	300.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	300.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	150.000.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	150.000.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	50.000.000,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	50.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	28.000.000.000,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	28.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	28.000.000.000,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	20.000.000.000,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	20.000.000.000,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	20.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	61.442.291.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	58.321.291.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	57.989.091.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.214.091.000,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	55.750.000.000,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	25.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	277.200.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	277.200.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	55.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	55.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.471.000.000,00
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	121.000.000,00
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	121.000.000,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	100.000.000,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	100.000.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.250.000.000,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.250.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.650.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.650.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.650.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.800.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.800.000.000,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.800.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.800.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	35.220.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	100.000.000,00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	100.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	5.000.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	30.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	30.000.000.000,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	30.000.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	120.000.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	120.000.000,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	120.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.010.706.630.724,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.845.645.766.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	263.318.358.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	263.318.358.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	263.318.358.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	22.010.851.000,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	22.010.851.000,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	22.010.851.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	227.579.125.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	69.492.622.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	54.084.100.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	15.209.255.000,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	194.436.000,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.831.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	154.683.555.000,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	2.000,00
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	37.597.146.000,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	302.895.000,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	745.897.000,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	114.272.464.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	931.346.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	833.805.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	3.402.948.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	3.402.948.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	928.464.162.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	790.548.445.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	790.548.445.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	137.915.717.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.400.000.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	33.360.256.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	58.754.841.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	36.982.616.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	7.418.004.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	404.273.270.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	113.823.162.000,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	988.172.000,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	536.121.000,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	321.887.000,00
4.2.01.09.01.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	12.449.656.000,00
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	45.744.733.000,00
4.2.01.09.01.0081	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	18.352.253.000,00
4.2.01.09.01.0088	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	1.200.000.000,00
4.2.01.09.01.0090	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	34.230.340.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	290.450.108.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	78.984.100.000,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.046.500.000,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	650.860.000,00
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	10.776.078.000,00
4.2.01.09.02.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	475.628.000,00
4.2.01.09.02.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	19.009.372.000,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.614.860.000,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	8.907.600.000,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	180.000.000,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.937.700.000,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00
4.2.01.09.02.0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	143.112.000.000,00
4.2.01.09.02.0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	2.596.750.000,00
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	9.623.000.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	165.060.864.724,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	108.242.749.554,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	108.242.749.554,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	58.092.919.737,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	176.073.860,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	49.973.755.957,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	56.818.115.170,00
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	56.818.115.170,00
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	56.818.115.170,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	36.651.123.158,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	36.651.123.158,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	36.651.123.158,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	36.651.123.158,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	36.651.123.158,00
	Jumlah Pendapatan	2.245.348.544.882,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.612.219.110.443,00
5.1.01	Belanja Pegawai	864.073.188.223,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	644.625.818.156,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	485.476.346.729,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	338.101.372.565,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	147.374.974.164,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	50.640.014.312,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	31.597.799.813,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	19.042.214.499,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.940.067.650,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.940.067.650,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	41.252.675.689,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	24.298.213.189,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	16.954.462.500,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.728.148.036,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.728.148.036,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	28.401.660.907,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	17.062.617.051,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	11.339.043.856,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.334.947.882,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.334.947.882,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	85.005.754,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.588.186,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	79.417.568,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	20.920.303.248,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	13.923.420.624,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.996.882.624,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.122.838.713,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	710.290.842,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	412.547.871,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	3.223.809.236,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	2.135.609.432,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	1.088.199.804,00
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	500.000.000,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	500.000.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	192.514.722.061,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	42.723.866.162,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	42.723.866.162,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	149.790.855.899,00
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	14.448.500,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	96.500.000,00
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	1.500.000,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	137.500.000,00
5.1.01.02.06.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	1.365.875.000,00
5.1.01.02.06.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	3.750.000,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	11.394.457,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	412.500,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	202.639.042,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	106.250.000,00
5.1.01.02.06.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	368.750.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	143.112.000.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.596.750.000,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.761.086.400,00
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	21.397.331.700,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.372.500,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.372.500,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	159.900.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	159.900.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	146.890.800,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	146.890.800,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	41.095.900,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	41.095.900,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.203.400.000,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	95.000.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	5.500.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	12.900.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.090.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.642.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.642.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	430.290.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	430.290.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	287.177.506,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	160.455.525,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	160.455.525,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.487.318,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.487.318,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	104.288.625,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	104.288.625,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.456.475,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.456.475,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.614.375,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.614.375,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	15.375,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	15.375,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.303.750,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.303.750,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	166.819,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	166.819,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	389.244,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	389.244,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	652.000.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	4.596.138.800,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	4.596.138.800,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	4.596.138.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	712.340.447.084,00
5.1.02.01	Belanja Barang	178.295.274.760,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	178.252.538.360,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	528.183.100,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.815.135.121,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.304.281.301,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	14.940.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	484.112.600,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	34.600.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	388.187.500,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	223.150.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	336.938.400,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	459.000,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	35.062.500,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	41.762.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.785.814.701,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.431.693.300,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.051.766.354,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	306.623.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.053.196.600,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	596.250.400,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.549.474.775,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	200.083.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	397.438.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	471.742.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.684.040.100,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	9.429.044.089,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	86.954.919.250,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	15.815.475.500,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	270.602.500,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	614.743.440,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.280.695.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.496.078.829,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.361.152.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.266.240.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	271.321.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	245.160.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	430.110.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	282.887.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	786.100.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	102.720.000,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	40.208.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	495.636.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	811.000.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	370.317.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	193.195.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	36.250.400,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	20.000.000,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	16.250.400,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	6.486.000,00
5.1.02.01.04.0132	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	6.486.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	287.773.069.234,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	198.289.239.754,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.389.600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.574.650.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	485.010.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	24.000.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	24.400.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	21.587.500,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	79.500.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	319.200.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.700.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	49.938.020.695,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	964.460.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	54.000.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6.735.580.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	494.540.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.749.400.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.110.600.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.640.700.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	126.100.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	32.758.560.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	4.692.820.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.334.230.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.138.484.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.237.500.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	8.190.533.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	400.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	4.233.200.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	324.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	161.900.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	9.900.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	212.400.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	4.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	6.191.650.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	72.600.000,00
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	14.400.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	422.200.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.029.700.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	70.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	480.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	626.697.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	359.775.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	418.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	536.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	75.013.050,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	7.757.300.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.489.021.829,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.662.700.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	98.150.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	255.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	909.254.200,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	16.877.126.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	125.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	240.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.492.477.480,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.357.400.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	66.851.991.480,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.374.485.080,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	55.754.095.200,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	4.460.299.200,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	243.398.400,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	304.248.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	842.400.000,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	1.115.246.400,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	757.819.200,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.166.354.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	44.400.000,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	206.700.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4.925.110.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	826.144.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	150.000.000,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	14.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.544.877.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	8.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	725.800.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	432.200.000,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	589.500.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	120.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	669.377.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	40.000.000,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	40.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.897.118.000,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	1.092.118.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	50.000.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	365.000.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	115.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	30.000.000,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	1.200.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	400.000.000,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	300.000.000,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	1.000.000.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.135.000.000,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	780.000.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	330.000.000,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	100.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	710.000.000,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	150.000.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	150.000.000,00
5.1.02.02.09.0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	100.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	300.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	10.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	125.000.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	35.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	90.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.727.989.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.958.898.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.339.000.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.430.091.000,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	420.500.000,00
5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	420.500.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	23.482.583.196,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	58.000.000,00
5.1.02.03.01.0028	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam	40.000.000,00
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	18.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.456.971.640,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	322.000.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	143.500.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.390.175.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.362.980.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.095.862.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	7.260.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	883.670.000,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	109.116.000,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	76.110.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.314.072.500,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	175.328.640,00
5.1.02.03.02.0140	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	10.397.500,00
5.1.02.03.02.0143	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	16.500.000,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	500.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.617.223.556,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.407.223.556,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	210.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.350.388.000,00
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	4.100.388.000,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	6.200.000.000,00
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	50.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	81.458.962.250,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	81.458.962.250,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55.792.739.250,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.561.723.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	104.500.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.680.175.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.974.500.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	911.400.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	454.700.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	383.400.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	4.225.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	705.675.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	405.675.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	300.000.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	66.709.964.845,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	66.031.764.845,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	63.649.924.845,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	2.381.840.000,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	678.200.000,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	399.600.000,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	278.600.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	17.242.465.599,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	17.242.465.599,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	17.242.465.599,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	50.697.952.200,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	50.697.952.200,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	50.697.952.200,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.200.000.000,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.200.000.000,00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.200.000.000,00
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.200.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	32.839.475.136,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	6.618.000.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	6.618.000.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	6.618.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	8.101.200.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.470.700.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.470.700.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	100.300.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	100.300.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.530.200.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.530.200.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.007.675.136,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.007.675.136,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.007.675.136,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	17.112.600.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	9.627.400.000,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	9.627.400.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	7.485.200.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	7.485.200.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.766.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.766.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.766.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.766.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	274.532.166.839,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	350.000.000,00
5.2.01.99	Belanja Modal Tanah BLUD	350.000.000,00
5.2.01.99.99	Belanja Modal Tanah BLUD	350.000.000,00
5.2.01.99.99.9999	Belanja Modal Tanah BLUD	350.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.453.372.111,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.604.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	2.604.000.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	80.000.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	2.524.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	19.028.160.150,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	19.022.960.150,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	13.303.554.150,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	2.964.278.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	250.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	295.128.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.210.000.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5.200.000,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	5.200.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	79.115.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	61.615.000,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	31.615.000,00
5.2.02.03.01.0008	Belanja Modal Peralatan Las	30.000.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	15.000.000,00
5.2.02.03.02.0006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	15.000.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	2.500.000,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	2.500.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	208.650.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	208.650.000,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	208.650.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.894.878.287,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	429.499.610,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	8.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	421.499.610,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7.734.594.677,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	4.996.633.894,00
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	3.780.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	35.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	897.978.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.795.922.783,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	5.280.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	730.784.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	59.200.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	671.584.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.621.946.004,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	392.357.144,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	91.250.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	250.131.444,00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	47.675.700,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	3.300.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	279.727.660,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	22.170.000,00
5.2.02.06.02.0007	Belanja Modal Alat-Alat Sandi	257.557.660,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	1.949.861.200,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	1.949.861.200,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	10.675.619.190,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	10.670.362.990,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	3.259.044.596,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	28.411.300,00
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	50.972.000,00
5.2.02.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	42.764.304,00
5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	1.659.816.995,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	5.629.353.795,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	5.256.200,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	5.256.200,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.942.228.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	150.000.000,00
5.2.02.08.01.0007	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	150.000.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.739.188.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.739.188.000,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	53.040.000,00
5.2.02.08.04.0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya	53.040.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.782.228.565,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.777.202.290,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	3.777.202.290,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.005.026.275,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	926.778.075,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	5.998.200,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	72.250.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	600.000.000,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	600.000.000,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	600.000.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	28.754.400,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	28.754.400,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	26.354.400,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	2.400.000,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	30.850.000,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	30.850.000,00
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	30.850.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	338.853.200,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	338.853.200,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	217.738.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	121.115.200,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	35.100.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	35.100.000,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	35.100.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	3.686.989.315,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	3.686.989.315,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	3.589.428.315,00
5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	97.561.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.896.000.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.896.000.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.896.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	88.667.156.756,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	88.452.156.756,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	82.952.156.756,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	11.583.408.346,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	38.563.700.610,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	147.186.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	27.083.239.800,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.000.000.000,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	800.000.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	566.800.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	3.030.000.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	177.822.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	5.500.000.000,00
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	5.500.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	65.000.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	65.000.000,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	65.000.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	150.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	150.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	150.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	122.483.992.132,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	80.560.294.137,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	53.254.641.137,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	52.354.641.137,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	900.000.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	27.305.653.000,00
5.2.04.01.02.0010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	7.755.653.000,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	19.550.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	41.523.697.995,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.243.000.000,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.243.000.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	25.410.697.995,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	25.410.697.995,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	14.870.000.000,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	14.870.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	350.000.000,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	350.000.000,00
5.2.04.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	350.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	50.000.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	50.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	50.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.278.645.840,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	240.000.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	240.000.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	240.000.000,00
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.430.000.000,00
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.430.000.000,00
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.430.000.000,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	3.608.645.840,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	3.608.645.840,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	3.529.046.840,00
5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	79.599.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	299.000.000,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	299.000.000,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	299.000.000,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	299.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	381.484.840.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.898.218.000,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	9.452.850.000,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	9.452.850.000,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	9.452.850.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	445.368.000,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	445.368.000,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	445.368.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	371.586.622.000,00
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00
5.4.02.02.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	500.000.000,00
5.4.02.02.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	371.086.622.000,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	369.690.822.000,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	369.690.822.000,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.395.800.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	1.395.800.000,00
	Jumlah Belanja	2.271.736.117.282,00
	Total Surplus/(Defisit)	-26.387.572.400,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	28.887.572.400,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	28.887.572.400,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	28.887.572.400,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	28.887.572.400,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	28.887.572.400,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.500.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	26.387.572.400,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Ogan Komering Ulu Timur, 31 Desember 2024

Bupati
H. LANOSIN